
PERAN POLITIK KYAI DI KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILU TAHUN 1994-2009

M. Dhuha Aniqul Wafa

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmail.com

ABSTRACT

The problems studied in this research is How the political role of clerics in the form of Rembang. How is the interaction between the government and the clerics with political figures. How is the role of clerics in influencing public policy preferences in the general election. Location of the study is the Apex District from 1994 to 2009 time frame. The research method used is the historical results of this study found at least two political streams clerics, religious scholars as an actor first and clerics as a participant . Conclusions drawn from this research that the role of clerics as community leaders not only have the " aura" or charisma in religion alone. Kyai also played a significant role in the political aspect. Moreover, the diversity or complexity of clerics in politics is not single. That is, clerics are not only a hero or a role model in terms of religion alone , but has a significant role in the development of democracy in Indonesia .

Keywords : Political Role , Kyai , Election

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk peran politik kyai di Kabupaten Rembang. Bagaimanakah interaksi antara kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik. Bagaimanakah peran kyai dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Rembang dengan batasan waktu 1994-2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah Hasil penelitian ini setidaknya menemukan dua aliran politik kyai, pertama kyai sebagai aktor dan kyai sebagai partisipan. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa peran kyai sebagai tokoh masyarakat tidak hanya memiliki "aura" atau kharisma dalam hal agama saja. Kyai juga memainkan peranan yang cukup signifikan dalam wilayah politik. Lebih dari itu, keragaman atau kompleksitas kyai dalam berpolitik tidak tunggal. Artinya, kyai tidak hanya menjadi tokoh atau panutan dalam hal agama saja, melainkan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Kata kunci: Peran Politik, Kyai, Pemilu

PENDAHULUAN

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa peran tokoh dalam sebuah partai menentukan pemilihan konstituen dalam pemilu, apalagi tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang atau minimal dipercaya karena ide-idenya atau hanya bermodal kharisma yang dimiliki. Tak hayal apabila banyak partai politik yang berebutan menawarkan seorang tokoh dalam kepengurusan partai. Bahkan diangkat dalam kepengurusan partai dan diminta untuk merestui partai tersebut dengan harapan memperoleh suara dari para konstituen yang memiliki hubungan emosional dengan sang tokoh. Bentuk kongkrit dari ketokohnya adalah ikut dalam mendeklarasikan sekaligus duduk dalam kepengurusan elite partainya. Dalam suatu masyarakat peran elite agama dan elite penguasa cukup berpengaruh dalam kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok tersebut antara lain aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam bidang politik adalah kyai.

Kyai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik di masyarakat, sebagai elite terdidik pesantren memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap masyarakat tersebut. Dengan kekayaan yang dimiliki kyai menjadi patron kepada siapa banyak penduduk bergantung. Posisi sentral kyai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama kalau pola ini menghubungkan dan mengikat kyai dengan para santri atau siswanya (Fox dan Dirjosanjoto, 1989:56).

Mereka adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada pada puncak strata sosial, mampu mengendalikan aktivitas perekonomian yang dominan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Sunnyoto Usman, 1991:27). Meskipun berjumlah lebih sedikit, mereka

dengan keunggulan yang dimilikinya dapat memerintah atau memaksa individu-individu lainnya untuk tunduk pada perintahnya. Keterlibatan para kyai dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Kemampuan untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Kyai dengan karismanya mampu menggerakkan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan.

Hal ini dikarenakan, pola hubungan kyai dan santri yang erat, merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Hal ini juga didasarkan pada fakta hubungan santri dan kyai tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren. Keberlangsungan hubungan santri dan kyai terus berjalan tidak pernah mengalami keterputusan, bahkan setelah santri pulang ke rumah dan sudah memiliki pesantren sendiri memiliki hubungan santri dan kyai tidak akan pernah putus (Khoiro Ummatin, 2002:79-80).

Dengan demikian kyai sebagai figur tempat konsultasi dalam bidang rohani dan juga dalam bidang kehidupan yang profan, tidak terkecuali dalam bidang politik adalah "agen perubahan" yang potensial, terutama dalam menjembatani kemauan pemerintah dengan kepentingan masyarakat (Achmad Patoni, 2007:3). Mereka adalah aktor-aktor bayangan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berpihak kepada "masyarakat" ketika kandidat yang didukung dalam posisi menang. Dalam aktivitas kyai misalnya, pandangan kyai dalam aktivitas politiknya, adalah memperjuangkan kepentingan dan sebagai kemaslahatan umat melakukan kekuasaan (Ridwan, 2007:4).

Setiap pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kyai memiliki arti bagi calon pemimpin daerah. Kyai dengan basis

massa riil akan menjadi modal yang signifikan dalam mendulang suara dan kemenangan. Pendek kata, keberadaan kyai yang mempunyai basis keelitan tersendiri diperlukan dalam rangka mobilisasi massa. Hal ini dikarenakan, salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elite politik (dalam hal ini kyai) yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol yang berkualitas untuk duduk di legislatif maupun eksekutif (Agus Pramono, 2005:30).

Tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan kyai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi kyai menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah. Kyai dengan karismanya mampu memobilisasi massa dalam rangka penggalangan massa untuk berkampanye. William Chang, menulis keterlibatan dalam dunia politik tidak boleh hanya didominasi oleh “*elit politik*” kelas tinggi, sementara rakyat kelas terbawah dan menengah disingkirkan. Ketidakmerataan dalam keterlibatan ini akan menimbulkan instabilitas sosial dalam sebuah Negara (William Chang, 2002:105).

Hal ini yang sebenarnya menjadi arah kebijakan, kyai dalam dukungannya. Jika dahulu kyai hanya dapat memainkan peran dalam hal memberikan restu kepada calon (karena dipilih melalui DPRD), sekarang kyai dapat secara leluasa memberikan “restu” kepada calon secara langsung (karena dipilih langsung oleh masyarakat). Semisal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang berlangsung pada Tahun 2009 yang lalu, terdiri dari 3 pasang calon yaitu H. Ahmad Kholid Mukri berpasangan dengan H Ahmad Djoemali, H. Moch Salim berpasangan dengan H Abdul Hafidz dan H. Yaqut Cholil Qoumas berpasangan dengan Arif Budiman SE, tidak bisa menampik peran keberadaan para kyai yang berpengaruh dalam proses pemilihan tersebut. Dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rembang peran elit lokal (kyai) dapat ditelusuri bagaimana para calon memanfaatkan kekuatan elit lokal (agama) tersebut untuk memenangkan proses pemilihan.

Peran kyai secara ideal adalah yang bersih dari politik praktis dan mengembalikan posisi sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengembalikan ulama sebagai pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya posisi kyai dimanfaatkan oleh elite politik. Dengan tetap eksisnya peran kyai di masyarakat Kabupaten Rembang, menimbulkan motivasi bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah, hal ini dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian metode sejarah di sini adalah suatu proses sejarah mengacu dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah (Gottschalk.1975:32), sedangkan menurut Garraghan dalam Wasino (2007:8), metode sejarah atau penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip - prinsip dan aturan - aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan - bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber - sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sinthese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) yang dicapai. Adapun tahapan - tahapan dalam metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Heuristik, (2) Kritik Sumber, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kyai dan Politik di Rembang

Keterlibatan kyai dalam panggung politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan, studi tentang kyai tidak

hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (kyai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan kyai mempunyai banyak wajah (*multy faces*) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman pandangan kyai dalam berpolitik. Dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kyai yang merupakan bagian dari rakyat mempunyai kedudukan yang strategis. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruhnya karena mempunyai keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan (Haryanto, 2005:63).

Kyai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kyai dengan massa yang hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Imbalan atas jerih payah kyai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam *iming-iming*, tidak lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Maka tidak aneh jika Endang Turmudzi menyatakan, adanya perselingkuhan kyai dan kekuasaan (Endang Turmudzi. 2004:23).

Karakteristik kyai di Rembang dalam memainkan peran penting dalam politik lokal adalah dengan kekuatan atau simbol-simbol agama. Kekuatan agama mendominasi basis karakteristik kyai dikarenakan, kyai sebagai publik figure masyarakat yang mempunyai *ilmu linuih* (terutama ilmu agama), sehingga masyarakat mempercayakan pilihan politiknya kepada apa yang dikatakan oleh kyai. Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam memperoleh kekuasaan menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, agama tidak selalu bermakna

tunggal. Agama mempunyai banyak wajah, sehingga kekuatan simbol-simbol keagamaan akan mampu menggerakkan seseorang dalam menentukan pilihannya. Pendek kata, simbol-simbol keagamaan akan tetap menjadi penuntun “keselamatan” seseorang dalam menentukan pilihan politik. Simbol-simbol keagamaan ini yang kemudian menjadi basis kekuasaan kyai. Selain itu posisi kyai juga didukung oleh sifat *taqlid* (meniru) yang sejalan dengan sistem nilai Jawa yang menganut paternalisme dan hubungan *patron client* (Abdurrahman Mas’ud, 2004:53). Kondisi ini didukung oleh paradigma kyai santri dimana para santri sebagai murid-murid yang patuh dari kyai memberikan penundukan total kepada kyai sebagai guru mereka.

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu masyarakat. Keberadaan seorang kyai dalam lingkungan sebuah masyarakat, adalah laksana jantung dalam kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensialnya seorang kyai, karena dialah pengelola, pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Secara ideal, seorang kyai diharapkan berperan sebagai figur moral dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakat, sebab dipundak mereka terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran seorang kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukan dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya.

Bermodal basis massa dan karisma, kyai mampu memainkan peran penting dalam suksesi seorang calon Kepala Daerah. Selain kyai terjun langsung ke gelanggang politik, ada kyai yang hanya menjadi partisipan atau hanya memberi restu kepada calon tertentu. Keadaan ini sebagai antisipasi perkembangan pesantren dan masa depan karir kyai jika ternyata calon yang didukung kalah dalam pilkada. Kyai tidak terlibat dalam kegiatan politik secara langsung. Ia hanya menjadi pendukung di garis belakang. Artinya, tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye calon tertentu. Keterlibatan kyai dalam politik hanya se-

batas pemberian restu kepada calon yang datang dan memohon restu ke pesantren. Pemberian restu tidak hanya diberikan kepada satu calon saja, melainkan ketika ada calon yang datang ke pesantren sang kyai dengan rela memberi restu untuk maju dalam pilkada. Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa, keragaman atau kompleksitas kyai dalam berpolitik tidak tunggal. Artinya, kyai tidak hanya menjadi tokoh atau panutan dalam hal agama saja, melainkan, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Peran sebagai elit lokal keagamaan dan elit lokal politik. Kewajiban seorang elit lokal keagamaan adalah membimbing, mendidik dan mengajar santri dan masyarakat mengenai nilai-nilai agama. Berpegang teguh dengan ajaran kitab suci menjadi hal utama. Dalam dunia ini kebenaran akan dikatakan benar (putih) dan kesalahan akan dikatakan buruk (hitam). Namun demikian dalam dunia politik hal itu akan berbeda. Kadang kebenaran dapat menjadi keburukan dan sebaliknya keburukan dapat menjadi sebuah kebenaran. Niat kyai menggeluti dunia politik sebagai agen perubahan akan menjadi sulit. Artinya, ukuran kebenaran dalam dunia politik mungkin akan berbeda dengan ukuran kebenaran dalam nilai-nilai.

Konfigurasi Politik Elite

Penyebutan kyai disematkan oleh masyarakat yang sering berkunjung ke pesantren atau masjid untuk mengaji. Sedangkan profil K.H. Dr. Abu Hafsini sebagai kyai khos NU yang tidak terlibat dalam partai politik dalam hal ini PKB. Ia malah sering ada dalam acara yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Walaupun ia tidak masuk dalam struktur kepengurusan Partai berlambang pohon beringin ini.

Kuatnya pengaruh kyai dalam sistem masyarakat seperti ini selain dikarenakan karakteristik masyarakat Jawa yang manut, tunduk, patuh pada perintah kyai juga didukung oleh faktor kyai yang memang

mempunyai ilmu dalam mengajak masyarakat atau menggerakkan masyarakat. Kelebihan ilmu kyai dalam manajemen massa ini yang kemudian membentuk gugusan yang menempatkan kyai dalam posisi elit lokal. Posisi elit lokal yang diusahakan dengan belajar dan tidak hanya mengandalkan pada garis keturunan merupakan terobosan baru dalam masyarakat.

Elit lokal yang dahulu hanya dikuasai oleh pejabat pemerintahan, kini dapat diraih oleh kyai. Hal ini dikarenakan, kyai memiliki basis massa sendiri (santri, pengikut, dan masyarakat sekitar pesantren) yang suatu saat akan membantunya meraih posisi elit di tingkat lokal. Kyai sebagai pemimpin agama tentunya juga menggunakan simbol-simbol agama dalam mengarahkan pilihannya kepada masyarakat. Simbol-simbol agama yang semakin menguatkan posisi dan peran serta kyai di panggung politik. Lebih dari itu, kyai juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup banyak yang tentunya tidak dimiliki oleh orang lain, seperti pesantren, tanah, bangunan sekolah dan lain-lain. Modal ini dalam masyarakat tradisional menjadi kekuatan tersendiri. Artinya, dalam masyarakat tradisional orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Dengan demikian, kyai sebagai salah satu bagian dari orang kaya dapat dengan "mudah" meraih simpati dari masyarakat yang golongan ekonominya lebih rendah darinya. Kekuasaan penuh kyai ini kemudian menempatkan posisinya dalam status sosial yang lebih tinggi. Dengan posisinya ini, kyai juga mampu melakukan kontrol terhadap maraknya politik uang yang telah menjadi "budaya" dalam setiap ajang pilkada. Politik uang dalam pandangan kyai pada dasarnya sama yaitu haram. Keharaman politik uang ini terletak pada motivasi memberikan sesuatu agar kelak dikemudian hari memilih pasangan calon yang memberi tersebut. Memilih pasangan calon adalah hak setiap warga masyarakat. Suara rakyat suara Tuhan, *vox populi vox die*. Membeli suara rakyat berarti telah berani membeli suara Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh K.H.Dr.Abu Hafsini : "Politik uang memang sudah biasa dalam setiap

pilkada. Namun, tidak boleh memberikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu. Ini uang sogok. Dan dalam Islam, yang menyogok dan disogok, diancam dengan api Neraka”(wawancara tanggal 13 Juli 2011). K.H. Dr.Abu Hafsin, bahwa bersama kyai lain telah membuat fatwa haram mengenai politik uang. Fatwa haram tersebut juga telah diketahui oleh KPU.

Fatwa haram ini juga diketahui oleh masyarakat Desa Rukem, sebagaimana diakui oleh Sudarsono:”Saya tahu fatwa tersebut. Keberhasilan fatwa tersebut menurut saya selain karena kyai yang memfatwakan, juga karena kesadaran masyarakat akan arti penting memilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena uang atau sumbangan lain.

Dengan demikian, kehadiran fatwa mengenai politik uang, tidak hanya menjadi komoditi elit, namun telah didengar dan dipraktikkan secara langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut, keberhasilan fatwa mengenai haramnya politik uang, juga didukung oleh semangat masyarakat untuk mandiri dengan pilihan politiknya.

Implikasi Keterlibatan Kyai

Dalam kancah perpolitikan lokal kini kyai memperoleh arena bermain. Ketika kyai mampu membaca peluang dan didorong oleh aktor politik tertentu, ia merupakan aset yang nyata dalam mendulang suara. Lebih dari itu, ketika kyai sudah memberanikan diri masuk dalam system politik (menjadi anggota salah satu partai politik) berarti kyai memainkan dua peran ganda sekaligus.

Kehadiran tokoh agama (kyai) dalam politik juga semakin mengokohkan peran posisi ulama di tengah masyarakat. Kyai tidak lagi hanya mengurus masalah-masalah profan saja. Kyai kini mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi dan mendidik masyarakat agar melekat politik. Politik sekarang tidak hanya menjadi lahan garap tokoh-tokoh politik saja, melainkan menjadi hal yang biasa dan menjadi milik siapa saja yang mau dan

peduli mengenai masa depan daerah termasuk di dalamnya adalah tokoh agama (kyai).

Panggung politik yang luas bagi kyai di era otonomi daerah tidak selamanya dimanfaatkan dengan baik. Artinya, dari contoh kasus K.H. Drs. Amin Makhsun dan H.M. Fuad Latif menunjukkan hal yang demikian. Walaupun mereka sudah terdaftar masuk dalam tim sukses pasangan H.Salim-Abdul Hafid, namun ia masih canggung memerankan fungsinya sebagai elit. Mereka tidak menggunakan daya paksa kekayaan untuk mendulang suara. Mereka tidak kuasa untuk memaksakan pilihan politiknya kepada orang lain. Entah karena, basis keagamaan yang melatarbelakangnya atau cerminan gaya kyai yang berbeda. Mereka lebih mempercayakan pilihan politik masyarakat kepada masyarakat sendiri dan kepada mesin partai politik. Jika mesin partai politik tidak berjalan, maka apa yang telah diusahakan oleh kedua kyai tersebut akan sia-sia belaka.

Sebuah pendekatan yang cenderung ‘memaksa’ masyarakat yang berbeda dan mempunyai karakter tersendiri untuk menyamakan perbedaan. Terlepas dari tarik menarik antar pendekatan ideologis dan kultural, organisasi kyai pada kenyataannya masih menikmati kegiatan yang bersifat sosial. Bagi kyai untuk mewujudkan pemantapan ideologis umat Islam, harus ditunjang dengan pendidikan dan sarana sosial lainnya yang memadai, atau kebijakan yang diambil kyai merupakan proses jangka panjang yang suatu saat dibutuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Keberadaan kyai di Kabupaten Rembang sebenarnya dalam posisi mendua yaitu sebagai tokoh politik dan sebagai tokoh agama. Sebagai tokoh agama kyai memberi

pengajaran bagi masyarakat yaitu melalui pesantren dan madrasah. Dalam bidang politik kyai seringkali di ajak oleh tokoh-tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang untuk mengikuti berbagi kegiatan dalam partai. Karena menurut tokoh politik dengan melibatkan kyai dalam partai maka pengikut dari kyai tersebut akan memilih partai tersebut. Aktifitas kyai dalam partai terlihat saat kyai mengikuti kampanye pada waktu pemilu, mengadakan ceramah-ceramah keagamaan pada waktu menjelang pemilu, memberikan anjuran pada masyarakat untuk mengikuti kampanye, dan mengikuti rapat partai yang diadakan untuk persiapan menghadapi pemilu.

Posisi kyai yang strategis mendorong kyai untuk harus berhubungan dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik. Interaksi antara kyai dengan pemerintah terlihat ketika pemerintah mengadakan suatu acara tertentu maka kyai menjadi tamu undangan dalam acara tersebut. Sebaliknya pemerintah setempat akan mendapat undangan dari kyai ketika kyai mengadakan acara. Kiprah kyai dalam pendidikan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Program-program yang diadakan pemerintah akan berjalan jika didukung oleh Kyai seperti pembayaran pajak, penggalangan dana untuk korban bencana alam dan prorm-program lain. Interaksi antara Kyai dengan tokoh-tokoh politik terlihat ketika para tokoh politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta dukungan dari para kyai. Menurut tokoh tersebut jika melibatkan kyai maka acara akan lebih di dukung masyarakat. Dalam interaksi antara kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik, kyai merupakan jembatan untuk menyampaikan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh politik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, 2006, *Politik Islam Politik: Pergu-*

- latan Ideologi PPP menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali Maschan Moesa, 1999, *Kyai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : Lepkiss.
- Arbi Sanit, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I April.
- Asnawi A, 2003, *Max Weber Sebuah Khazanah*, Yogyakarta : Ikon Teralitera, Cetakan I, April.
- Budiharjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darojat, Aliyud. 2006. *Kenahdlatul Ulama*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Dennis Wrong (Ed), 1970, *Max Weber—Makers of Modern Social Sciens (Series)*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
- Ecip, Sinansari S. 1994. *NU; Khittah dan Go-daan Politik*. Bandung: Mizan.
- Einar M Sitompul, 1989, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Feillard, Andree, 1999, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKIS.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah dan Pengantar Metode Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosutanto. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Geertz, Clifford, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hussein Syifa, *Menggagas Model berpolitik NU yang relevan Bagi Masa Depan Santri*, 2004
- Kacung Marijan, 1999, “Ketika PKB Ingin Menjadi Partai Besar” dalam Hairus Salim HS, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta : LkiS.
- Kevin R Evans, 2000, *Sistem Baru, Suasana Baru Pemilu 1999 yang Dinanti Dalam Almanak Parpol Indonesia : Pemilu 1999*, Jakarta : API
- Khoirudin, 2005, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.
- Koentjaraningrat, 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*, Jilid II, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.

Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sartono Kartodirdjo, 1981, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : LP3ES

Sri Edi Swasono, 2001, *Reformasi Menjadi Defor-*

masi, dari Lingseng ke Lingsar, Jakarta : UI Press.

Zamarkhsyari Dhofier, 1983, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES.